



Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Maha Kuasa atas rahmat dan KaruniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dan perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen nyata Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran Kinerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj IP Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini di masing – masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKj IP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip - prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKJIP ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.



Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkajene Sidenreng, 10 Januari 2026

Kepala Bapperida

Herwin, S.IP, M.Si.

Pangkat : Pembina Tk1

Nip : 19850706 200502 1 001



Daftar Isi

Halaman		
Sampul		
Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Bab I pendahuluan		1
A. Gambaran Umum Organisasi		1
B. Sistematika Laporan		1
Bab II Perencanaan Kinerja		9
A. Perencanaan Strategis		9
B. Perjanjian Kinerja		13
Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025		16
A. Capaian Kinerja Organisasi		16
B. Realisasi Anggaran		32
Bab IV Penutup		38
Lampiran		



IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu implementasi dari tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Kinerja merupakan dokumen laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Pelaporan kinerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Bapperida mengembangkannya 2 sasaran strategis daerah dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 – 2029 yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi. Untuk mewujudkan sasaran tersebut telah disusun Renstra Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 terdokumentasi dalam rencana kerja yang ditujukan untuk mencapai tahapan maupun target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra maupun RPD. Operasionalisasi rencana kerja tersebut melalui rencana kerja dan anggaran sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran dan belanja daerah tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Bapperida pada tahun 2025, masih dijumpai beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Untuk itu sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pemerintah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten diperlukan guna mengeliminir kendala terkait regulasi. Selain daripada itu, kompetensi dan integritas sumberdaya aparatur perencana daerah cukup berperan dalam mendukung keberhasilan kinerja perencanaan pembangunan, sehingga perlu semakin dioptimalkan di masa mendatang.

Pada akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya dan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya dan untuk penyusunan dokumen LKjIP pada periode berikutnya harapannya lebih baik lagi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal mendasar dan penting yang diperlukan dalam penyusunan ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundang undangan tersebut diatas, maka Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai instansi pun memiliki kewajiban menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Bapperida Tahun 2025-2029.

keberhasilan suatu instansi pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keluaran, proses, manfaat dan dampak dari program dan kegiatan tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Peneliti dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidrap telah



menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun anggaran 2025 dan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2025.

B. Sistematika Laporan

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan susunan sebagai berikut :

a. Kepala Badan;

b. Seketaris Badan

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Perencanaan

c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sosial Pemerintahan
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Inovasi dan Teknologi

d. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam Dan Pembangunan Manusia

1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perekonomian
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Sumber Daya Alam
3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

e. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan Dan Pemerintahan

1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Infrastruktur
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Kewilayahan
3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pemerintahan



f. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Perencanaan Dan Pendanaan
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Data Dan Informasi
3. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Bidang Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan

2. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai lembaga perencana mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis dan rencana Anggaran Satuan Kerja Badan membina dan pengkoordinasian unit kerja dan instansi terkait melaksanakan administrasi kepegawaian, pengendalian dan pelaksanaan kewenangan daerah di bidang riset, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas, serta membuat laporan secara berkala.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, riset dan inovasi
4. Pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.



c. Kewenangan

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Bapperida Kabupaten Sidrap, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Merumuskan program kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan Rencana Anggaran satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan badan kepada setiap OPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal.
- f. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Badan, Mengarahkan dan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi badan
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
- h. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang riset, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan Daerah
- i. Mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan dalam pemberian Pelayanan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah
- j. Menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah dinas hasil kerja bawahan



- k. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Pengembangan Daerah
- l. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja secara berkala
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi badan.
- n. Merumuskan, menetapkan dan mengkoordinasikan penetapan kinerja badan

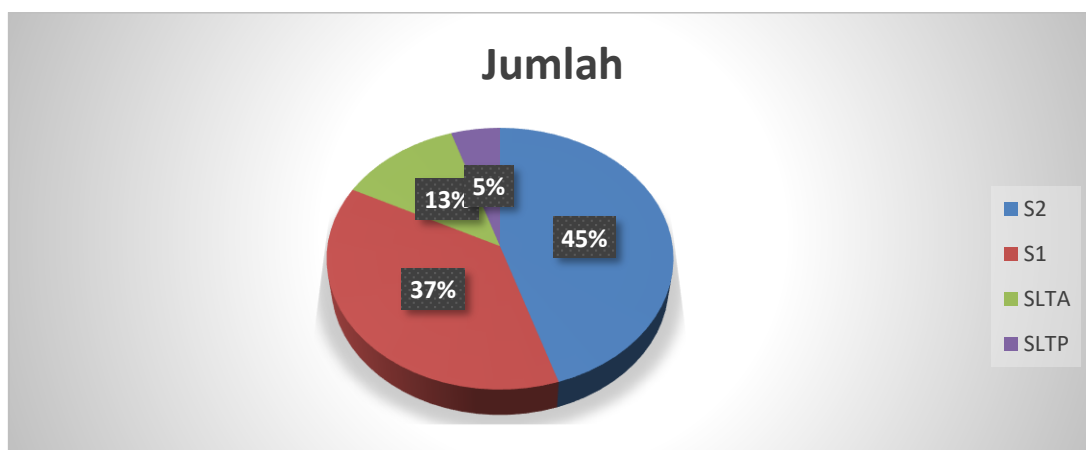
d. Kepegawaian

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi perencanaan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana dan sarana prasarana tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut harus ditunjang dengan ketersediaan aparat yang memiliki kompetensi dan kemauan kuat dalam menjalankan Visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. Gambaran tentang kondisi kepegawaian perangkat daerah ini dapat digambarkan sebagai berikut;

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah pada Tahun 2024 berjumlah 40 orang PNS yang terdiri atas 17 Orang Laki-laki dan 23 orang perempuan. dan tenaga sosial sebanyak 29 orang.

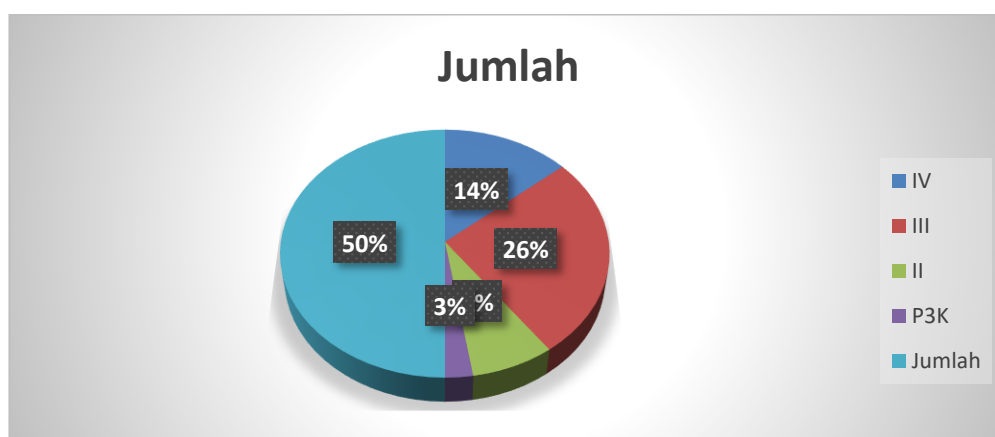
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Latar Belakang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	S2	18
2	S1	15
4	SLTA	6
5	SLTP	2
Jumlah		41



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah
1	IV	11
2	III	21
3	II	6
4	P3K	3
Jumlah		41

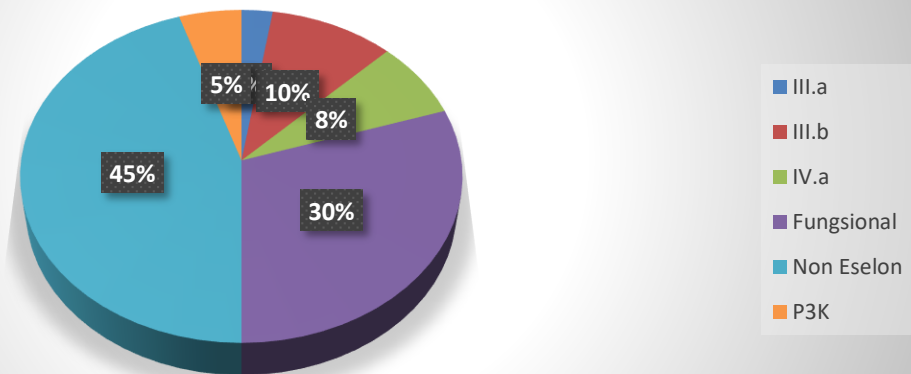


Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Menurut Eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	III.a	1
2	III.b	4
3	IV.a	3
4	Fungsional	12
5	Non Eselon	19
Jumlah		41



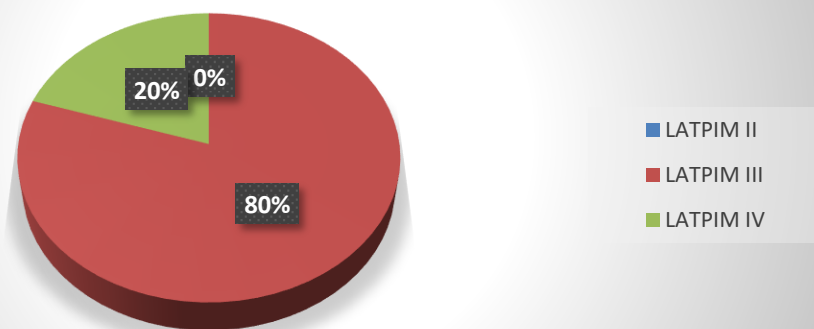
Jumlah



Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti Diklat

No.	Diklat	Jumlah
1	LATPIM II	0
2	LATPIM III	4
3	LATPIM IV	1
Jumlah		5

Jumlah



3. Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

a. Maksud

Penyusunan penyusunan LKjIP Bapperida Tahun 2025 adalah sebagai berikut

- Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang



- Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola
- Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang
- Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahunnya
- Sebagai informasi alternatif pemecahan terhadap permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

b. Tujuan

Tujuan dari disusunnya LKjIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah sebagai berikut : mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi, sehingga kita dapat mengetahui dan menilai bagaimana keberhasilan dan kegagalan SKPD ini dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam kurung waktu satu tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini merupakan fase akhir yang dapat dijadikan sebagai alat untuk evaluasi guna perbaikan kinerja SKPD ini dimasa yang akan datang. Sebagai media akuntabilitas setiap instansi pemerintah, LKjIP merupakan bentuk perwujudan kewajiban menjawab yang disampaikan kepada atasan atau pemberi wewenang. Oleh karena itu dalam manajemen modern LKjIP merupakan salah satu media utama dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi.

B. Fungsi Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum mempunyai fungsi strategis yaitu :

- **Berkualitas** adalah perencanaan pembangunan yang sistematis dan terarah yang sesuai tahapan dan memperhatikan kebutuhan, prioritas serta sumber daya yang tersedia.
- **Partisipatif** adalah perencanaan pembangunan daerah melibatkan para pemangku kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur lain yang terkait
- **Akuntabel** adalah perencanaan pembangunan daerah yang transparan, dapat diterima oleh semua pihak dan akurat



Berdasarkan fungsi strategis tersebut di atas maka dirumuskan langkah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif
2. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
3. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas aparatur Bapperida dalam perencanaan pembangunan daerah

C. Permasalahan Utama

Adapun permasalahan utama Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan kebijakan umum pemerintah daerah, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bapperida.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bapperida dalam perencanaan pembangunan, riset dan inovasi.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Target

No.	TUJUAN	Indikator Tujuan	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kinerja Sasaran Tahun Ke				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peran Riset dan Inovasi Dalam Mendukung Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja)	100	100	100	100	100
				Persentase dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disusun tepat waktu sesuai regulasi	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	75.3	77.8	78.2	79.35	79.9
2		Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	2.69	2.88	3.07	3.26	3.45

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas program agar dapat tetap eksis dan unggul dalam era kompetisi yang semakin ketat, setiap instansi dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan melakukan berbagai perubahan kearah yang lebih baik. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas yang mengarah kepada pencapaian hasil yang lebih optimal. Untuk mampu menjawab berbagai tantangan dan kondisi ketidakpastian dewasa ini setiap instansi perlu menyusun perencanaan strategis.



Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pimpinan dalam bentuk rencana induk (master plan) yang komprehensif untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka pencapaian tujuan organisasi maka misi Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan sebagai berikut;

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sector disertai pengendalian monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dengan sistem partisipatif.
- b. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- c. Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, penelitian dan pengembangan yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah
- d. Meningkatkan kualitas aparatur Bapperida dalam perencanaan pembangunan daerah

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi buapti maka unit organisasi tersebut kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan Tujuan dan sasaran.

a. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Oleh karena itu tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Terpenuhinya kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan keselarasan perencanaan pembangunan seluruh stakeholder



2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, kontinuitas, pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
3. Menyediakan dan mengelolah data/informasi riset dan pengembangan untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah
4. Meningkatkan kualitas personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu sasaran harus lebih bersifat spesifik, dapat dinilai dan diukur, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun.

Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan
3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategik. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi; Strategi, penetapan kebijaksanaan, dan program operasional.

a. Strategi.

Strategi adalah upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dengan memilih alternative terbaik untuk pencapaian tujuan dan sasaran secara lebih terarah. Strategi akan memperjelas makna dan hakikat suatu rencana strategik khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik. Dengan kata lain strategi merupakan terjemahan pemikiran kepada tindakan yang diarahkan pada penyelenggaraan operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan unsur organisasi. Suatu strategi hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang yang mungkin



dapat berubah-ubah. Selain itu hal yang harus diperhatikan ialah bahwa strategi memperhitungkan juga lingkungan organisasi secara keseluruhan yang dapat berdampak terhadap kelancaran pelaksanaan strategi.

Adapun strategi yang akan dilakukan adalah :

- Melaksanakan monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan secara berkala
- Memfasilitasi dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk memanfaatkan hasil penelitian/kajian hasil kelitbangan

b. Kebijakan.

Kebijaksanaan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang mengatur secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijaksanaan merupakan pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Untuk itu kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bapperida adalah sebagai berikut;

- 1) Melakukan upaya sinkronisasi antar dokumen perencanaan
- 2) Membangun jaringan dalam rangka kerjasama dengan universitas, LSM dalam melakukan kajian kelitbangan
- 3) Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga terkait dalam melakukan kajian kelitbangan
- 4) Melakukan dokumentasi dan publikasi hasil kajian kelitbangan dan kemudian mendorong pemanfaatan hasil kajian

c. Program.

Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program operasional merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijaksanaan.

Beberapa Program yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Riset Dan Inovasi Daerah



B. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja)	100 %
		Persentase dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disusun tepat waktu sesuai regulasi	100 %
2	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai Sakip	BB
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	2.69

Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada Kepala Bapperida untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala Bapperida dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala Bapperida) dan pemberi amanah (Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.



5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Kepala Bapperida pada Tahun 2025 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mewujudkan target kinerja. Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, Bapperida telah melaksanakan 4 program 15 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp 7.545.812.000,- (Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), yang selanjutnya. secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bapperida dengan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bapperida dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut. Pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan dapat memberikan umpan balik (feedback) yang merupakan hal penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan dimasa mendatang. Melalui pengukuran Kinerja ini diharapkan kinerja Bapperida dalam melaksanakan kegiatan dan program kerjanya selama satu tahun dapat diketahui.

Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten terhadap hasil evalusuasi APIP Tahun 2025 adalah 77.8 (BB), terhadap hasil rekomendasi tersebut telah dilakukan langkah langkah tindak lanjut sbb :

Rekomendasi	Tindak Lanjut
1. Perencanaan Kinerja	
a. Menyusun SOP Alur Perencanaan Kinerja RPJMD s.d LKjIP.	SOP Alur Perencanaan Kinerja RPJMD s.d LKIP Telah disusun
b. Menyusun Crosscutting	Crosscutting sudah dibuat
c. Menyusun Laporan Monev.	Laporan Monev dilaporkan setiap triwulannya di aplikasi E Monev
2) Pengukuran Kinerja	
a. IKU menguraikan defenisi operasional	IKU telah didifenisikan dan sudah disertai sumber data
b. Pengukuran kinerja secara berkala dg	Telah dilakukan pertemuan berkala



membuat laporan monev, didokumentasikan rapat-rapat internal terkait pembahasan kinerja.	terkait laporan triwulan dan sudah didokumentasikan
3) Pelaporan Kinerja	
a. Laporan Kinerja disertai bukti dukung direviu/evaluasi	Laporan Kinerja sudah disertai bukti dukung dan telah direviu
b. Melakukan Upaya perbaikan yang berkesinambungan sebagai Upaya peningkatan kinerja.	Telah dilakukan Upaya yang berkesinambungan sebagai langkah perbaikan kinerja
4) Evaluasi Internal	
a. Melakukan evaluasi program dengan memanfaatkan rekomendasi-rekomendasi hasil Evaluasi program untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.	Evaluasi dilakukan sebagai langkah perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja
b. Melakukan Upaya dalam meningkatkan jumlah SDM Aparatur.	Menugaskan aparatur lingkup Bapperida untuk mengikuti kegiatan peningkatan SDM aparatur
c. Senantiasa melakukan Langkah dalam Upaya meningkatkan implementasi sakip	Telah dilakukan upaya, Langkah dalam upaya meningkatkan implementasi sakip.

Untuk mengukur pencapaian suatu sasaran strategis suatu organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan ini disampaikan dalam bentuk tabel

Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Perumusan	Target 2025	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja)	Persentase Konsistensi Program RPD - RKPD	100 %	100 %	100 %
	Persentase dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disusun tepat waktu sesuai regulasi	Persentase Konsistensi Program RKPD - APBD	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Penilaian APIP	BB	BB	100 %
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	Penilaian BRIN	2.69	2.69	100 %



Tabel IKU di atas, kinerja telah mencapai 100 persen dan telah memenuhi kriteria sangat memuaskan, dan satu indikator belum mencapai 100 persen. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.1 Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Secara umum Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, dan diharapkan tahun 2025 mencapai hasil yang sama. Rincian analisis capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
---	--

Analisis pencapaian **Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah**, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Konsistinsi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja)	Persen	100.00	100.00	100.00
	Persentase dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disusun tepat waktu sesuai regulasi	Persen	100.00	100.00	100.00
Rata rata capaian					100.00

Sesuai Indikator 1 Persentase Konsistinsi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja) tahun 2025 sebanyak 132 program dari target 132 program dengan capaian kinerja sebesar 100.00 %, sedangkan Indikator 2 Penjabaran Konsistinsi Program RKPD Kedalam APBD sebanyak 127 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 100.00 %



b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja)	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Persentase dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disusun tepat waktu sesuai regulasi	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2022-2024) terhadap indikator kinerja persentase program kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan (RPJMD,RKPD) rata rata mencapai 100 % adapun rincinan sbb :

- Tahun 2023 Target 132 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 96.21 %
- Tahun 2024 Target 127 Program Realisasi 123 Program dengan persentase 98.00 %
- Tahun 2025 Target 127 Program Realisasi 127 Program dengan persentase 100.00 %

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan (RPJMD-RKPD, RPJMD-Renstra, RKPD-Renja)	Persen	100.00	100.00	100.00
2	Persentase dokumen perencanaan	Persen	100.00	100.00	100.00



	(RPJPD, RPJMD, RKPD) yang disusun tepat waktu sesuai regulasi				
--	---	--	--	--	--

Persentase Program Kegiatan Yang selaras dengan dokumen perencanaan (RPD, RKPD) sampai dengan tahun 2025 dari target kinerja 127 program teralisasi 127 program dan capaian 100.00 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

Dari 1 program tersebut terdiri dari 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan beberapa sub kegiatan tidak mencapaia 100

Pemberian reward dan punnishment telah diberlakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan tujuan agar aparatur lingkup Bapperida lebih berkinerja agar target yang telah diperjanjikan dapat tercapai. Reward diberikan kepada Tim Penyusun LKJIP atas upaya sehingga Sakip OPD dengan Predikat B, tentunya predikatan itu dapat ditingkatkan menjadi BB pada Sakip ahun Berikutnya. Adapun Punnismet diberikan kepada 1 orang ASN yang belum bias mematuhi aturan jam kerja diberikan surat teguran dengan harapan bisa lebih disiplin dan patuh dengan jam kerja.

Kelemahan dari pencapaian sasaran 1 tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp. 7.199.836.400 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 6.742.080.032 atau 93.64 persen.



f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah sebanyak 3 program 13 kegiatan dan 38 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bapperida Tahun 2025 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan
- Dukungan anggaran,sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan

- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

2 Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

Analisis pencapaian **Sasaran 2:** Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan dalam mendukung kinerja pemerintah daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	1	Nilai Sakip	Kategori	BB	BB	100.00
Rata rata capaian						100.00

Sesuai Indikator 2 Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun 2024 BB (75.30) dari target BB dengan capaian kinerja sebesar 100.00 %,

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Sakip Perangkat Daerah	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2022-2024) terhadap indicator kinerja Nilai Sakip Perangkat Daerah rata rata mencapai 100 % adapun rincian sbb :

- Tahun 2022 Target B dengan realisasi B (70.95)
- Tahun 2023 Target BB dengan realisasi BB (75,3)
- Tahun 2024 Target BB dengan realisasi BB (77.8)

c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori	BB	BB	100.00

Target nilai sakip yang direncanakan tercapai di 2024 dari target kinerja BB dengan ralisasi BB tentunya dengan beberapa catatan dari tim reviu sakip kabupaten.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan/peningkatan pencapaian beberapa indikator pada sasaran koordinasi dan kerjasama yang baik sehingga yang direncanakan dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang diharapkan.

Dari 4 program tersebut terdiri dari 15 kegiatan dan 42 sub kegiatan tingkat realisasi fisik/kegiatan mencapai 100 %, ada satu program yang capaiannya tidak mencapai 100 % diakibatkan beberapa sub kegiatan tidak mencapaia 100

Pemberian reward dan punnishment telah diberlakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah dengan tujuan agar aparaturnya lebih berkinerja agar target yang telah diperjanjikan dapat tercapai. Reward diberikan kepada Tim Penyusun LKJIP atas upaya



sehingga Sakip OPD dengan Predikat BB, tentunya predikatan itu dapat ditingkatkan menjadi A pada Sakip tahun Berikutnya.

Kelemahan dari pencapaian sasaran 2 tentunya sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan upaya pencapaian target tahun berikutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian dokumen perencanaan sebesar Rp. 7.555.812.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 7.221.419.333 atau 95.70 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Perencanaan pembangunan yang tepat waktu ini adalah sebanyak 3 program 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

factor factor yang yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bapperida Tahun 2025 adalah :

- Dukungan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan
- Dukungan anggaran,sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan

- Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan.

3 Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah

Analisis pencapaian **Sasaran 3** : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:



a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Kapabilitas Inovasi	Point	2.69	2.69	100
Rata rata capaian					100

Tujuan Indeks Kapabilitas Inovasi Daerah adalah untuk memotivasi pemerintah daerah meningkatkan inovasi, mendorong pelayanan publik yang lebih baik, meningkatkan partisipasi masyarakat, mendorong good governance, serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan pembinaan bagi daerah inovatif, yang pada akhirnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Tujuan Utama Indeks Inovasi Daerah:

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah: Mendorong pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk lebih inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui inovasi di berbagai bidang.
3. Mendorong Partisipasi Publik: Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses inovasi pemerintah daerah.
4. Mendorong Good Governance: Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
5. Meningkatkan Daya Saing Daerah: Membangun kemampuan daerah untuk bersaing secara nasional maupun global.
6. Menjadi Dasar Apresiasi & Pembinaan: Memberikan penghargaan (seperti Innovative Government Award) dan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk pembinaan daerah.
7. Menyediakan Data & Pemetaan Inovasi: Mengukur, memetakan, dan menyediakan data inovasi daerah secara akurat untuk evaluasi dan perbandingan.



Manfaatnya:

1. Menciptakan kompetisi positif antar daerah.
2. Menghasilkan kebijakan pembangunan yang terukur dan berbasis bukti (evidence-based policy).
3. Memperbaiki kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Indek kapabilitas Inovasi dicapai atas penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Bapperida melalui bida riset dan inovasi daerah juga melakukan pendampingan kepada perangkat daerah dan stakeholder untuk melakukan riset dan inovasi. Adapun pencapaian dari hasil riset/kajian dan inovasi yang telah difasilitasi/didampingi sebanyak dari 30 penelitian/kajian dan inovasi dari target sebanyak 37 melebihi dari target yang direncanakan atau sebesar capaian 123 %, hasil penelitian/kajian yang dimanfaatkan sbb :

1. Survei ini dilakukan Untuk Mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidrap Pada Unit-Unit Pelayanannya Yang Meliputi: pelayanan Pelayanan Perizinan, pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, dan pelayanan pajak. Tujuannya adalah :
 - a) Memperoleh Data Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Sidrap Dalam Hal Ini Berbagai Instansi Yang Terkait.
 - b) Memperoleh *Feed Back* Umpan Balik Berupa Masukan/Keluhan Terhadap Perkembangan Kebutuhan Masyarakat Untuk Melakukan Perbaikan/Peningkatan Kinerja/Kualitas Pelayanan Secara Berkeseluruhan.
 - c) Mengetahui Kesenjangan Antara Harapan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Dengan Kondisi Nyata Dilapangan Yang Dirasakan Melalui Gap Analysis. Mendapatkan Informasi Tentang Peringkat Kepuasan Dan Tingkat Kepentingan Terhadap Unsur-Unsur Pelayanan Dengan Menggunakan Matriks *Importance* Dan *Performance* Sebagai Acuan Prioritas Dalam Melakukan Perbaikan Pelayanan.

2. Survei Opini Publik

Survei opini publik terhadap kinerja pemerintah daerah adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur pemerintahan pelayanan publik dengan membandingkan



antara harapan dan kebutuhannya. Tujuan Umum dilakukan survei ini untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan untuk bidang layanan dasar dan layanan umum, Adapun tujuan khusus dari survei ini yaitu pertama sebagai data dan informasi bagi pemerintah tentang kinerja pemerintahan dari sector kondisi perekonomian, layanan pemerintahan/instansi, akses kepada barang dan jasa, indeks kinerja, dan indeks harapan warga. Kedua sebagai mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing program-program unggulan daerah, ketiga sebagai umpan balik dalam memperbaiki kualitas program dan layanan dan yang keempat adalah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

INOVASI YANG DIFASILITASI DAN DI HASILKAN

No	Nama Inovasi	Uraian	OPD	Implementasi
1	WANITA HEBATKU (Kawasan Agrobisnis Taman Herbal Obat Keluarga)	Inovasi Wanita Hebatku bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menurunkan jumlah penyakit dan angka kesakitan dengan membiasakan masyarakat untuk mengkonsumsi sayur mayur yang murah namun bergizi tinggi dan tanaman obat herbal yang mudah diakses. yang kedua mandiri secara ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menjual mentah hasil produksi tanaman obat keluarga dan mengolahnya mejadi produk makanan dan minuman, seperti abon cabe, abon jantung pisang, abon pepaya, stik labu kuning, teh dan kopi stamina yang dikemas dengan baik sehingga menarik minat konsumen. yang ketiga adalah ramah lingkungan dengan memanfaatkan lahan pekarangan tanpa harus menyewa atau membeli lahan sebagai taman obat keluarga, menambah jenis tanaman TOGA sehingga tercipta lingkungan yang indah, tertata rapi, bebas dari pencemaran udara sehingga layak untuk dikunjungi dan menjadi tempat berwisata bagi para pecinta tanaman dan obat	Puskesmas Lancirang	7 Agustus 2017



		herbal. yang keempat sosial budaya serta terbentuknya kader dan kelompok TOGA sebagai penggerak pelaksana inovasi dan menjadi wadah bersilahturahmi antar kelompok dan masyarakat sehingga terwujud kehidupan masyarakat yang harmonis. Sasaran inovasi ini adalah masyarakat di wilayah Puskesmas Lancirang		
2	JURUS SANG PENDEKAR (Jaga Ibu Hamil Bersama Bidan Desa, Suami dan Ibu Mertua dalam Penanganan Anemia/ Kurang Zat Besi)	JURUS SANG PENDEKAR merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko anemia ibu hamil di Desa Mojong Inovasi JURUS SANG PENDEKAR dirintis untuk memecahkan masalah tersebut dengan sasaran semua ibu hamil. Dan semua layanan yang diberikan bersifat gratis. Caranya dengan merekrut kader posyandu menjadi kader Fe yang bertugas melakukan deteksi dini kehamilan bersama keluarga. Mereka dipilih karena setiap hari memiliki mobilitas tinggi dan jejaring informasi yang kuat di masyarakat. Bagi ibu hamil anemia akan didampingi mulai saat hamil sampai 42 hari masa nifas. Keberhasilan inisiatif ini berbanding lurus dengan komitmen Bidan Desa dan keberanian untuk melakukan reformasi pelayanan dengan menggabungkan 5 JURUS SANG PENDEKAR, memberikan pendampingan ibu hamil anemia melalui para kader Fe dan keluarga terdekat serta membangun sinergitas dengan melibatkan banyak unsur di masyarakat ternyata hasilnya sangat menggembirakan. Bahkan, sampai mampu menekan angka anemia, komplikasi persalinan dan bayi menjadi ZERO. Sasaran dari inovasi ini yaitu Masyarakat Desa Mojong dan masyarakat di wilayah Puskesmas Empagae	Pukesmas Empagae	3 Oktober 2017



3	PIA BUJANG ASIK (PIAGAM IBU PEJUANG ASI EKSKLUSIF)	Pemberian piagam untuk ibu yang telah memberikan asi eksklusif dan balita yang tamat posyandu	Puskesmas Baranti	2 Januari 2018
4	MBAH SIJAKA (LIMBAH SISA JADI BERKAH)	Inovasi ini diinisiasi oleh Instalasi Gizi RS Arifin Nu'mang yang bertujuan untuk mengurangi limbah sisa makanan di unit dapur. Sisa nasi serta bahan makanan adalah salah satu limbah yang hampir setiap hari diproduksi dan dibuang begitu saja di tempat sampah tanpa ada pengolahan lanjutan, hingga lambat laun memberikan efek bau yang kurang sedap pada lingkungan dan pemandangan yang tidak menyenangkan serta menjadi media serangga dan dapat memunculkan penyakit. Inovasi ini pula dapat dimanfaatkan pada sektor pertanian karena pupuk organik Mbah Sijaka tidak mengandung bahan – bahan kimia yang berbahaya bagi tanaman lainnya sehingga dapat digunakan bagi petani, mengingat daerah Kabupaten Sidrap merupakan daerah agraris. Manfaat inovasi ini Mengurangi sampah organik ataupun sisa nasi yang ada di Instalasi Gizi Rumah Sakit Arifin Nu'mang Rappang dan Meningkatkan kesadaran petugas untuk pengolahan lebih lanjut dari sisa makanan dibuang begitu saja yang dapat menimbulkan penyakit. Sasaran inovasi ini Petani, Pasien dan Petugas Kesehatan RSUD Nene Mallomo	RSUD Arifin Nu'Mang	1 Agustus 2019
5	Pemanfaatan Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Produktivitas dan Pendapatan Petani	1.Inovasi Mikroba Lokal Padat 2.Inovasi Pupuk Organik Padat 3.Inovasi pupuk organik cair daun 4.Inovasi Pestisida Nabati 5.Pertanian Padi Ramah Lingkungan	BLUD UPT Puskesmas Belawae	8 Januari 2020
6	WIROSABLENG (Wadah Edukasi Remaja Putri untuk Stop Hamil Usia Belia melalui Penyuluhan KESPRO Cegah Stunting)	Inovasi Wirosableng merupakan serangkaian upaya yang bertujuan untuk menurunkan angka kehamilan pada remaja dan prevalensi stunting di Desa Mojong Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui 4 langkah inovatif melalui	Puskesmas Empagae	1 Februari 2020



		kolaborasi dengan semua stakeholder dalam kegiatan “FRESH” (forum remaja sehat/ posyandu remaja) dan “TERAS REMAJA “(Pojoyok Literasi khusus remaja) melalui platform WA, memonitoring sasaran remaja putri dengan menggunakan “BENDERA SANTRI”, Pemberian konseling dan penghargaan sebagai reward keberhasilan dalam menunda kehamilan dan pembetulan SATGAS 1000 HPK (hari pertama kehidupan). Manfaat dari inovasi ini yaitu menurunnya angka kehamilan remaja, menurunkan anemia dan Berat bayi lahir rendah. Sasaran inovasi ini yaitu Desa Mojong Kec. Watang Sidenreng		
7	GAYA SEHATKI (Gerakan Keluarga Sayang Seribu Hari Pertama Kehidupan)	Inovasi ini wadah Pemberdayaan Masyarakat dalam mencegah dan menurunkan angka kejadian stunting di desa Sumpang Mango. Inovasi ini didasari oleh data Stunting Desa Sumpang Mango paling tinggi di Kecamatan Pituriawa tahun 2020, di mulai sejak bulan Oktober 2020. Sebagai upaya dalam melakukan Intervensi gizi spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif dengan melibatkan elemen masyarakat di fasilitasi oleh LintasPROGRAM Pelayanan Puskesmas dan Lintas Sektor Tingkat Desa. Manfaat dari inovasi ini adalah menurunnya angka stunting di desa sumpang mango kec.pitu riawa Sasaran inovasi ini adalah Pasangan Usia Subur (PUS), kehamilan, Persalinan, Neonatus, Bayi sampai berumur 24 Bulan di Desa Sumpang Mango	Puskesmas lancirang	20 Oktober 2020
8	English Corner SIPEMBERANI	English corner si pemberani merupakan salah satu program bagian dari English corner goes to school yang dirintis oleh English Corner. English corner merupakan organisasi bahasa Inggris terbesar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berpusat di SMP Negeri 1 duapitue program English corner si pemberani ini telah berjalan sejak 2021 sampai saat ini	UPT SMPN 1 DUAPITUE	3 Februari 2021



		dan telah menjangkau ribuan siswa dan ratusan sekolah. Program ini pada dasarnya memberikan pengajaran bahasa Inggris secara gratis kepada siswa SD yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.		
9	ANJANG SANA ANJANG SINI	Masalah kesehatan masyarakat Indonesia yang dihadapi saat ini adalah meningkatnya kasus Penyakit tidak menular (PTM). Untuk menyelesaikan permasalahan ini dan sesuai Amanah Permenkes No.71 tahun 2015 tentang penanggulangan PTM, maka kami menginisiasi membuat Inovasi “Anjang Sana Anjang Sini” yang telah diujicobakan pada Tahun 2021 dan diterapkan secara intens di tahun 2022 Tujuan inovasi adalah Meningkatkan pelayanan skrining kesehatan dalam rangka deteksi dini dan penemuan kasus penyakit tidak menular (PTM) di wilayah kerja Puskesmas Pangkajene.	UPT Puskesmas Pangkajene	2 April 2021
10	PESAN TOBAT DARI SURGA PESAN TOBAT DARI SURGA (Peduli Sanitasi Total Berbasis Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa)	inovasi ini hadir sebagai solusi konkret untuk menjawab permasalahan yang dialami oleh para penyandang disabilitas dan Orang Dengan Gangguan Jiwa. Inovasi ini mampu memberdayakan penyandang disabilitas dan meningkatkan kepedulian masyarakat, memandirikan penyandang disabilitas, khususnya Dalam mengimplenasikan Lima Pilar STBM di kalangan Rumah Tangga dan khusus untuk ODGJ bisa tertangani dan tidak terlantar Serta Mengakses Sanitasi Dasar serta Mengimplemntasikan Lima Pilar STBM. Manfaat dari Inovasi ini adalah Manfaat lahirnya Inovasi ini yaitu mendukung program pemerintah “Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM)” Dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), sebagai upaya memulihkan keberfungsian orang yang mengalami hambatan fisik, mental, psikologis, maupun sosial, dengan bertumpu pada peran keluarga dan	Puskesmas Lancirang	1 Juli 2021



		kelompok masyarakat, serta mendayagunakan berbagai potensi sumber daya masyarakat untuk membentuk kemandirian penyandang disabilitas Dan Orang Dengan Gangguan Jiwa Sehingga Dapat Meberikan Kontribusi yang Besar Untuk mendukung terciptanya lingkungan yang sehat bersih dan nyaman. Sasaran dari Inovasi Ini adalah masyarakat di Desa Lasiwala Kec. Pitu riawa		
11	LAUT BANDA (Layanan Utama Bank Data)	Inovasi LAUT BANDA (Layanan Utama Bank Data) merupakan kegiatan pengelolaan data dengan tujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan daerah yang memenuhi prinsip satu data. Dimana data yang dikumpulkan merupakan indikator Permendagri 86 tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah, indikator permendagri 18 tahun 2019 tentang LPPD, indikator Perpres 59 Tahun 2017 tentang SDGs, indikator Permendagri 100 tahun 2018 tentang SPM. Manfaat dan output dari inovasi ini adalah meningkatnya ketersediaan data, terwujudnya akurasi data dan informasi aktual guna penyusunan rencana dan evaluasi PROGRAM pembangunan dan juga terwujudnya single data (satu data) serta penguatan pengelolaan data statistik sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sasaran Inovasi Inovasi ini adalah Organisasi Perangkat daerah dan Masyarakat Umum	Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6 September 2021



12	LEMOTA BERSOLEK	Inovasi ini adalah sebuah edukasi di bidang pertanian tentang bagaimana kita mampu mengelola potensi sumber daya yang ada di suatu desa agar bermanfaat secara utuh. Melihat potensi wilayah di desa betao adalah jeruk nipis dengan luasan lebih dari 300 Ha, maka dipilihlah judul Lemota yang artinya "jeruk kita" sedangkan bersolek adalah kepanjangan dari "Bersih olah ekonomi kemilau". Inovasi ini berusaha meningkatkan nilai ekonomi dengan cara melakukan pengolahan terlebih dahulu agar memiliki nilai jual yang lebih tinggi dengan memanfaatkan Sumber daya manusia khususnya wanita tani disekitar berupa jeruk nipis bubuk instan, sirup, sabun cuci tangan dan limbah menjadi pupuk organik cair. Sasarannya adalah Wanita tani di Wilayah Kerja BPP Pitu riawa	UPT BPP Pitu riawa Dinas Tanaman Pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan Kab. Sidrap	7 September 2021
13	KLIK IDE (Klinik Inovasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah)	Inovasi ini merupakan sebuah KLINIK yang memfasilitasi, menganalisis hingga melahirkan INOVASI yang mampu terintegrasi terhadap perencanaan pembangunan daerah yang disiapkan oleh perangkat daerah dari RPJMD, RKPD, RENSTRA hingga RENJA dan terejawantah menjadi PROGRAM, KEGIATAN dan . Manfaat dari inovasi ini yaitu Menyelesaikan masalah, pokok masalah dan akar masalah pembangunan di kabupaten Sidenreng Rappang, Menyusun/ Merancang PROGRAM, Kegiatan dan serta Mencapai target realisasi capaian PROGRAM visi misi RPJMD, capaian data PROGRAM dan data makro, capaian indikator target perencanaan pembangunan daerah. Manfaat yang diperoleh yaitu masuk Prolegda Perda Inovasi Daerah tahun 2022, dilakukan revisi terhadap Perbup TPP agar ASN yang memiliki Inovasi mendapatkan REWARD/ Penghargaan sebagai prestasi	Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13 Desember 2021



		kerja setelah menjalankan inovasinya selama 1 tahun, serta Beberapa calon innovator telah aktif ke KLIK IDE melakukan koordinasi, konsultasi dalam Menyusun dan melaksanakan Inovasi Daerah sesuai urusannya. Sasaran Inovasi Ini adalah Inovator dari Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, ASN, dan Masyarakat Umum		
14	CEGAT DENGAN PEKA (CEGAH DAN DETEKSI DINI AMPUTASI DIABETES DENGAN PERAWATAN KAKI)	inovasi “ CEGAT DENGAN PEKA”, yang merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan dan perawatan yang berguna untuk mencegah dan mendeteksi dini luka diabetik pada penderita diabetes. Kegiatan pemeriksaan dan perawatan yang dimaksud adalah dengan cara 3 M, yaitu : M1: Memeriksa kaki secara rutin untuk menemukan masalah secara dini, M2: Memberikan edukasi tentang cara menjaga kaki, M3: Memberikan perawatan untuk masalah kaki yang serius. Manfaat dari Inovasi ini adalah menurunkan jumlah pasien diabetes yang menderita luka pada kaki. dan juga pasien diabetes semakin semangat dalam memeriksakan kesehatannya dan rutin dalam melakukan perawatan kaki. Sasarannya adalah Pasien RSUD Nene Mallomo	RSUD Nene Mallomo	5 Februari 2022
15	MIPC (Mapping of Integrated Pest Controller)	Inovasi Media Penyuluhan berupa Penyediaan informasi terkait konsep pengendalian hama terpadu yang disertai dengan penggunaan istilah masyarakat lokal yang ada di lapangan. Pengendalian Hama Terpadu (PHT) ini adalah suatu konsep pengendalian OPT atau hama dan penyakit dengan pendekatan ekologi yang bersifat multidisiplin untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan beragam taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. manfaat dari Inovasi	UPT BPP Pancarijang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	18 Mei 2022



		ini mengurangi intensitas serangan hama dan penyakit. Hama dan penyakit utama yang menyerang untuk setiap musim tanam adalah tikus, penggerek batang putih yang menyebabkan sundep dan beluk, hawar daun bakteri (kresek), dan wereng batang coklat (WBC).kemudian yang kedua meningkatkan kapasitas petani dalam Penggunaan pestisida yang tidak bijaksana yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, pengguna, dan konsumen. dengan menerapkan konsep PHT (Pengendalian Hama Terpadu). Sasarannya adalah Petani di wilayah BPP Pancarijang		
16	RUMAH LANGIT (Ruang Masyarakat Khusus Layanan Pendidikan Non Formal Gratis Terintegrasi)	Inovasi ini bertujuan memberi layanan pendidikan Non formal kepada masyarakat didaerah-daerah tertentu melalui ruang yang dibentuk untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dibidang pendidikan dan menjadikan rumah sebagai wadah atau sarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi-informasi terkait pendidikan dibidang pendidikan melalui kerjasama pihak Satuan Pendidikan Non Formal "UPT SPNF SKB SIDRAP" dengan pihak-pihak terkait. Manfaat yang dapat diperoleh dari inovasi ini yaitu masyarakat sadar pentingnya pendidikan , Mengurangi angka putus sekolah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakanPROGRAM pendidikan kesetaraan, Muncul bibit-bibit baru yang unggul dan sadar akan Pendidikan dan individu-individu yang aktif, kreatif, inovatif dan berdaya dengan adanyaPROGRAM pendidikan, pemberdayaan dan kepemudaan, masyarakat dapat mendeteksi lebih awal potensi-potensi masalah yang akan muncul diwilayahnya dan lebih peka terhadap masalah-	UPT SPNF SKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20 Mei 2022



		masalah sosial dan budaya yang ada di sekitarnya, Munculnya komunitas komunitas baru yang bergerak kearah yang positif, terciptanya tenaga pendidik lebih sadar dan memahami makna pekerjaan dalam memberi pelayanan dibidangnya. Sasarannya adalah Masyarakat Umum Putus Sekolah atau belum sekolah.		
17	SIAP TILANG! (Scan Barcode, Isi Aplikasi, Tindak Lanjuti dan Tangani Langsung)	Inovasi ini berupa aplikasi layanan pengaduan pasien rumah sakit Nene Mallomo menggunakan konsep scan barcode. aplikasi ini bisa dilakukan oleh semua lini pemberi pelayanan, untuk memudahkan masyarakat memberikan informasi yang bersifat aduan baik dari segi SDM maupun dari segi sarana dan prasarannya, agar pemangku kebijakan dalam hal ini pimpinan instansi terkait dapat dijadikan bahan evaluasi atau segera mengetahui apabila ada hal hal yang tidak berjalan sesuai aturan yang ada. Manfaat dari adanya inovasi ini, informasi terkait masalah masalah yang ada dipelayanan dapat segera diketahui, segera bisa dilakukan perbaikan, dan bisa menjadi bahan evaluasi oleh pimpinan RSUD Nene Mallomo. Dengan inovasi ini peningkatan mutu pelayanan bisa ditingkatkan lagi sesuai harapan masyarakat. Sasaran Inovasi ini Pasien RSUD Nene Mallomo	RSUD Nene Mallomo	1 Juli 2022



18	D-ROBOTICS: DIGITAL ROBOTICS FOR INNOVATION & CREATIVE STUDENTS (Inovasi Layanan Pendidikan Berbasis Robotika untuk Memperkuat Literasi Digital dan STEM di Satuan Pendidikan)	D-ROBOTICS merupakan program kokurikuler berbasis teknologi yang mengintegrasikan pelatihan robotika sederhana, pemrograman, dan literasi STEM ke dalam kegiatan sekolah. Program ini melibatkan siswa secara aktif untuk merakit dan memprogram robot, serta mengembangkan soft skills seperti kolaborasi dan kreativitas. Tujuan dari inovasi ini antara lain: untuk menarik minat masyarakat untuk bersekolah di SMP Negeri 1 Pancarijang, meningkatkan kesiapan digital dan STEM peserta didik, menjadikan sekolah sebagai pionir pendidikan teknologi di Kabupaten Sidrap, serta membangun model pembelajaran robotika yang dapat direplikasi.	SMP Negeri 1 Panca Rijang	Juli 2022
19	SIDRAP BERAS	SIDRAP BERAS: B : Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) E : Edukasi dan Partisipasi Masyarakat R : Retribusi Sampah A : Angkutan Sampah S : Sumber Sampah Inovasi ini bertujuan untuk mengembangkan Inovasi Pengolahan Sampah dengan mendorong pengembangan teknologi. Pendekatan Smart City dalam tata kelola persampahan dengan menekankan pentingnya menciptakan akun atau rekening sampah bagi setiap warga sebagai dasar sistem yang adil dan transparan.	Dinas Lingkungan Hidup	1 Juli 2025
20	Smart Is Beauty (SISTEM PELAYANAN INFORMASI OBAT BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MASYARAKAT)	Sistem Pelayanan Informasi Obat Berbasis Elektronik Untuk Masyarakat (Smart Is Beauty) dikembangkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penggunaan, penyimpanan bahkan cara membuang obat sisa yang ada di rumah. Inovasi ini merupakan aplikasi mobile berbasis android yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi obat yang diinginkan masyarakat dengan	PKM Rappang	3 Januari 2023



		memperhatikan akses informasi obat secara cepat, singkat, akurat dan mudah dipahami		
21	PHARMACY RAJA INSTANT	Inovasi Pharmacy Raja Instant dibuat karena kurangnya informasi obat yang didapatkan pasien serta kurang patuhnya pasien dalam minum obat secara tepat waktu. Hal inilah yang menjadi serangkaian upaya untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait obat di Kecamatan Pitu Rawa Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuktikan dengan hasil adanya beberapa pasien yang datang berkunjung ke Puskesmas Lancirang, setelah dilakukan metode wawancara dan pembagian kuesioner untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat seperti nama obat, khasiat/kegunaan dari obat, aturan pakai, cara penggunaan serta efek samping obat. Dari hasil survei internal yang dilakukan di UPT Puskesmas Lancirang pada bulan Juli di tahun 2022 yakni dengan cara pengambilan sampel secara acak sebanyak 100 pasien/responden dari berbagai kalangan (baik dari segi pendidikan dan usia) didapatkan bahwa dari total responden tersebut, sebanyak 15% pasien tidak tahu cara menggunakan obat atau aturan pakai obat, 45 % pasien kurang tahu cara menggunakan obat atau aturan pakai obat dan 40 % pasien yang tahu cara menggunakan obat. Adapun untuk kepatuhan minum obat secara tepat waktu, sebanyak 65% kurang tau tentang pentingnya minum obat tepat waktu, 35 % pasien yang tau tentang pentingnya minum obat tepat waktu. Dari data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pasien tentang obat serta pentingnya minum obat tepat waktu masih kurang dikarenakan pasien kurang mendapatkan informasi	PKM LANCIRANG	3 Januari 2023



		yang jelas, lengkap dan menyeluruh oleh petugas farmasi, serta pasien tidak mau bertanya kepada petugas farmasi terkait informasi yang diberikan, meskipun informasi yang diberikan masih kurang lengkap. Hal ini yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang pengetahuan obat yang benar		
22	DVD SCHOOL (DASHBOAR VISUALISASI DATA)	Inovasi ini merupakan aplikasi penyajian layanan visualisasi data sekolah, dengan harapan akan semakin meningkatkan efisiensi proses pencarian informasi. aplikasi ini berisi Visualisasi data peserta didik, Visualisasi data perkembangan jumlah peserta didik, Visualisasi data kehadiran guru dan peserta didik, Visualisasi data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan Visualisasi data laporan BK. manfaat inovasi ini yaitu : Tersedianya data dan informasi yang lengkap, yang disajikan dalam visualisasi yang menarik dan mudah dipahami, Termonitornya perkembangan hasil belajar, kehadiran peserta didik dan kehadiran guru, Tersedianya data visual yang mudah dipahami tersebut, memudahkan pembuatan kesimpulan dan menyederhanakan proses pengambilan keputusan serta membantu dalam hal pencarian data dalam jumlah besar dan waktu yang singkat.	SMP Muhammadiyah Boarding School Dinas Pendidikan	16 Januari 2023
23	Kampung RUBUHA (RUMAH BURUNG HANTU)	Tujuan Inovasi ini adalah untuk mengendalikan serangan hama tikus yang berdampak pada penurunan produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Outcome yang diharapkan dari inovasi ini adalah: Meningkatnya jumlah produksi padi yang didapatkan oleh petani di sekitar RUBUHA dan Menurunnya jumlah serangan hama tikus yang dirasakan oleh petani di sekitar RUBUHA. Output Yang diharapkan dari inovasi ini adalah: Jumlah pembuaatan dan pemasangan	BPP Kecamatan Tellu Limpoe DTPHPKP	Agustus 2023



		rumah burung hantu meningkat di wilayah dua desa 5 unit tiap tahun, dan Jumlah penyuluhan yang dilakukan 4 kali tiap minggu.		
24	PAKAJAKI' (PEDOMAN PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN BERDASARKAN KINERJA DAN KEWILAYAHAN)	Salah satu persoalan dalam pembangunan daerah di kabupaten Sidenreng Rappang adalah proses penentuan anggaran atau dana yang dialokasikan untuk setiap kecamatan menimbulkan polemik karena belum adanya regulasi yang mengatur hal tersebut. Penentuan pagu indikatif kecamatan masih berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya saja, tanpa memperhatikan faktor lain seperti ketersediaan sumber daya, kondisi sosial ekonomi, potensi ekonomi, kondisi geografis dan capaian kinerja dari kecamatan sehingga muncul ketidakadilan dalam penentuan anggarannya. Sekaitan dengan permasalahan diatas, dibutuhkan suatu strategi atau instrumen untuk dapat memastikan pembagian alokasi pagu indikatif kecamatan dapat dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan berbagai faktor. Adapun tujuan inovasi ini yaitu tersedianya formulasi anggaran berdasarkan karakteristik wilayah dan kinerja kecamatan, terintegrasinya formulasi anggaran ke penyusunan dokumen perencanaan yang kemudian menjadi dasar dalam penentuan pagu pada APBD, dan meningkatnya kinerja pelayanan kecamatan, menurunnya angka kemiskinan dan stunting pada wilayah kerja kecamatan serta mendorong kemandirian daerah melalui meningkatnya pencapaian realisasi PBB.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	September 2023



25	" PENARI " (PEMBINA MURID)	"PENARI" adalah akronim dari (Pembina Murid). Merupakan salah satu program yang ada di sekolah kami untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa dalam berbicara dan berpikir kritis serta melatih kepercayaan dirinya. Mereka bergiliran tampil menjadi PEMBINA MURID memberikan amanat/wejangan kepada teman-teman mereka setiap hatinya saat apel pagi.	UPT SMPN 3 DUA PITUE	2 Januari 2024
26	Melestarikan Kesenian Tari dan Musik Tradisional Masyarakat Bugis: Kearifan Lokal	Kearifan lokal merupakan aset penting yang melambangkan identitas dan budaya suatu masyarakat. Salah satu elemen penting dalam kearifan lokal masyarakat Bugis adalah seni tari dan musik tradisional, yang tidak hanya merupakan sarana hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai sejarah, spiritual, dan sosial yang mendalam. Proyek ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk melestarikan budaya lokal, khususnya seni tari dan musik tradisional masyarakat Bugis Kabupaten Sidenreng Rappang, yang menghadapi tantangan besar di tengah perkembangan.	UPT SMPN 4 DUA PITUE	8 Januari 2024
27	Menstimulus konsentrasi belajar siswa melalui pembiasaan literasi berbasis pendekatan Hipnoterapy (baca Qur'an)	15 menit sebelum memulai pembelajaran Peserta didik diberikan waktu untuk membaca Al'quran guna supaya mereka lebih fokus serta lebih tenang menerima materi yang akan disajikan oleh bapak/ibu guru.	UPT SMPN 5 PANCA RIJANG	16 Januari 2024
28	Passalama (Pelajar Pancasila dalam Mitigasi Bencana)	Inovasi Pelajar Pancasila dalam Mitigasi Bencana merupakan proyek penguatan profil pelajar pancasila yang mengintegrasikan nilai-nilai pancasila dalam mitigasi bencana. Proyek ini bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap tanggap bencana dalam kehidupan sehari-hari	SMP MUHAMMADIYAH RAPPANG	5 Februari 2024



29	Si Raja Baca (Sidrap Sejahtera Karena Membaca)	Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) menghadapi tantangan dalam meningkatkan budaya membaca di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan orang dewasa. Meskipun sudah ada fasilitas perpustakaan dan program pendidikan, minat baca masyarakat masih tergolong rendah, yang berpotensi menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Inovasi "Si Raja Baca" atau "Sidrap Sejahtera Karena Membaca" diinisiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tujuan untuk mengubah mindset dan kebiasaan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Praktik baik ini sangat penting, karena membaca merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan informasi, yang pada gilirannya akan mendukung kemajuan daerah dan pembangunan SDM yang lebih baik. Peserta dalam praktik ini meliputi: 1. Masyarakat, secara umum yang diharapkan berperan aktif dalam mengakses bahan bacaan dan mengikuti kegiatan yang ada. 2. Petugas perpustakaan, yang bertanggung jawab dalam menyediakan layanan berkualitas serta melakukan promosi dan pengelolaan program. 3. Pemerintah daerah, yang mendukung kebijakan serta pendanaan untuk melaksanakan kegiatan ini. 4. Stakeholder, di antaranya bersama komunitas literasi, ataupun komunitas lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang	3 April 2024
30	PEKA PAS Perawat	Isi daripada Penilaian Kinerja Perawat: 1. Sikap Kerja, 2. Kinerja Pelayanan (Uraian Tugas), 3. Mutu Pelayanan.	UPT RSUD NENE MALLOMO	1 Juli 2024



31	Pustakawan Pintar (Pustakawan Profesional, Inovatif, Kreatif, Adaptif, Responsif)	Hingga saat ini, Kabupaten Sidenreng Rappang menghadapi tantangan dalam pengelolaan perpustakaan. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya tenaga perpustakaan atau pustakawan yang memiliki inovasi dalam mengelola perpustakaan. Banyak pustakawan yang bekerja di instansi pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, namun belum memiliki keterampilan yang cukup untuk mengelola dan mengembangkan perpustakaan secara inovatif dan kreatif. Kondisi ini membuat peran pustakawan di Kabupaten Sidenreng Rappang tidak maksimal dalam meningkatkan minat baca, mengelola koleksi perpustakaan, dan menyediakan akses informasi yang efektif bagi masyarakat, terutama siswa. Banyak pustakawan yang hanya menjalankan tugas administratif tanpa adanya inovasi dalam pelayanan perpustakaan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan atau inovasi untuk meningkatkan kemampuan pustakawan di daerah ini. Pustakawan Pintar, yang merupakan akronim dari Pustakawan Profesional, Inovatif, Kreatif, Adaptif, dan Responsif, menjadi sebuah inisiatif yang sangat penting untuk menjawab tantangan ini. Inovasi ini bertujuan untuk mendorong pustakawan sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang agar menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengelola koleksi buku, tetapi juga berinovasi baik dalam memanfaatkan teknologi ataupun penerapan metode baru untuk meningkatkan minat baca, menyediakan informasi, serta mendukung proses pembelajaran di sekolah. Peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik ini sangat krusial. Pustakawan yang terlibat diharapkan untuk menjadi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang	7 Juli 2024
----	---	--	---	-------------



		lebih dari sekadar penjaga buku, melainkan sebagai fasilitator pembelajaran, penyedia informasi yang akurat, serta kreator kegiatan literasi yang dapat memotivasi siswa dan guru untuk memanfaatkan perpustakaan secara lebih maksimal.		
32	SIDRAP OK (sidenreng Rappang Online Kependudukan))	SIDRAP OK adalah inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menggunakan aplikasi WahatsAPP untuk memberikan layanan administrasi kependudukan. dimana masyarakat yang ingin mengurus administrasi Kependudukannya tidak perlu datang Ke Dinas Dukcapil melainkan bisa menggunakan whatsapp untuk megurus dokumen kependudukannya dengan menghubungi Kontak Whatsapp yang ditentukan. dan setelah diverivikasi dan dproses oleh petugas kemudian berkas yang sudah jadi dikirim melalui amail pemohon untuk di cetak di lokasi pemohon.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	25 Juli 2024
33	INOVASI KARTU DIGITAL SISWA	Inovasi Kartu Digital Siswa hadir sebagai solusi untuk membangun keterhubungan yang transparan antara sekolah, siswa, dan orang tua. Melalui fitur-fitur terintegrasi, kartu ini membantu memantau perkembangan belajar, kehadiran, asesmen, hingga laporan disiplin siswa secara real-time dan efisien. Inilah langkah kecil menuju sekolah digital yang berdampak besar. sekolah sering menghadapi tantangan dalam menyampaikan informasi perkembangan siswa kepada orang tua secara cepat, akurat, dan menyeluruh. Keterbatasan sistem manual membuat komunikasi dan pelaporan kurang optimal. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menghadirkan Kartu Digital Siswa sebagai solusi terpadu yang mengintegrasikan berbagai aspek penting dalam pemantauan dan pelaporan perkembangan siswa.	UPT SMP Negeri 4 PITU RIAWA	1 Januari 2025



34	TAHFIDZ TALQIN JUARA	Kelas Tahfidz yang kami buat adalah kelas tahfidz pertama di sekolah dasar negeri Kabupaten Sidenreng Rappang yang menjadi mata pelajaran wajib di satuan pendidikan kami. Program ini menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya meningkatkan keimanan murid dengan pembiasaan positif melalui hafalan Qur'an. Metode yang digunakan adalah metode talqin protaba dan dipandu oleh guru kelas di UPT SD Negeri 11 Rappang yang telah mendapat lisensi/sertifikat sebagai pelatih tahfidz. Kelas tahfidz ini menjadi bagian dari mata pelajaran sekolah dan ciri khas keunggulan sekolah kami, bukan lagi kegiatan ekstrakurikuler. Kelas tahfidz dimulai setiap hari sekolah selama 1 jam pelajaran dan akan ditambah sesuai hasil evaluasi tiap bulan sesuai kurikulum yang telah disediakan. Selain kurikulum yang terstruktur, kami juga melengkapi kelas tahfidz dengan media pembelajaran audio visual sehingga mampu memfasilitasi tipe belajar tiap murid: audio, visual, dan audio-visual.	UPT SD Negeri 11 Rappang	2 Januari 2025
35	SELALU DI HATI (Senyum, Laksanakan Pelayanan Untuk Dikembangkan menjadi Harapan Sehat Masyarakat Indonesia)	Membentuk tim Duta Pelayanan dimana Duta Pelayanan mulai dari Kluster 1, Kluster 2, kluster 3 dan Lintas Kluster mendampingi selama dilakukan pelayanan sampai selesai, mengisi link survey kepuasan dan meninggalkan Puskesmas.	BLUD UPT Puskesmas Belawae	2 Januari 2025



b. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kapabilitas Inovasi	2,00	2,00	100	2.30	2.49	100	2.18	2.18	100

Capaian kinerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2023-2025) terhadap indikator kinerja capain 100 % dan sesuai dengan target yang direncanakan. Dengan rincian realisasi sbb :

1. Trend Target dan realisasi

- Pertumbuhan Nilai: Terdapat fluktuasi pada nilai target dan realisasi. Puncak performa tertinggi secara angka terjadi pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar 2,49.

- Penurunan di 2024: Pada tahun 2024, terjadi penurunan target menjadi 2,18 (dibandingkan target 2,30 di tahun sebelumnya). Realisasi tahun 2024 juga menurun ke angka 2,18, yang menunjukkan adanya penyesuaian ekspektasi atau perubahan standar penilaian pada tahun tersebut.

2. Tingkat Capaian Kinerja

- Konsistensi Sempurna: Selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024), tingkat capaian selalu berada di angka 100%.

- Efektivitas Perencanaan: Hal ini menunjukkan bahwa instansi sangat efektif dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Realisasi selalu mampu menyamai atau melampaui target (seperti pada 2023 yang melampaui target 2,30 menjadi 2,49).

3. Catatan Khusus per Tahun

Tahun 2022: Kinerja stabil dan presisi (Target = Realisasi = 2,00) dan

2023: Tahun dengan performa terbaik. Realisasi (2,49) melampaui target (2,30), menunjukkan adanya akselerasi inovasi yang signifikan. Sedangkan capaian hasil fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan kisaran tahun 202-2024 :

1. Tahun 2022 Target 4 penelitian/kajian dan inovasi yang dimanfaatkan dan capain realisasi 100.00 %
2. Tahun 2023 Target 4 penelitian/kajian dan inovasi yang dimanfaatkan capain realisasi 100.00 %



3. Tahun 2024 Target 7 penelitian/kajian dan inovasi yang dihasilkan dan di dimanfaatkan capain realisasi 100.00 %

g. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Rata-rata realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	2.69	2.69	100%

Realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap target kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Riset dan Inovasi Daerah dan realisasi 100.00 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan/peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Keselarasan program antar dokumen perencanaan ini didukung dengan dilakukannya pendampingan kepada opd untuk dapat melakukan kajian dan riset dan hasil dari riset dan inovasi tersebut dapat rasakan manfaat dan hasilnya bagi OPD dan Stakeholder yang berkaitan dengan kajian dan penelitian tersebut.

Dari 37 rencana penelitian dan inovasi yang direncanakan sepenuhnya telah dilaksanakan yang mendukung pencapaian indeks kapabilitas inovasi namun tentunya dalam pelaksanaan terdapat catatan yang menjadi bahan perbaikan pada kegiatan kegiatan selanjutnya.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2025 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya indek kapabilitas inovasi dengan anggaran RP. 345,975,000 dengan realisasi Rp. 305.513.654 atau 88.00%

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



Adapun beberapa catatan factor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja Bapperida Tahun 2025 adalah :

1. Dukungan sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam perencanaan, riset dan inovasi
2. Dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Ketetapan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan
4. Ketersediaan data pendukung dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program kegiatan

B. REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	Persen	100	99.63	99.63
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persen	100	100	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	Laporan	5	5	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100	100	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	462	462	100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	100%	100	100	100



Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	%	100	97.34	97.34
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	180	175	97.22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100	100	100
Pengadaan mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	Unit	1	1	100
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	19	19	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	96.8	96.8
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	414	395	95.41
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persen	100	78.26	78.26
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	25	83.33
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	15	11	73.33
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Persen	100	100	100



	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	Persen	100	100	100
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	Persen	100	100	100
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	3	3	100
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	B Acara	2	2	100
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	B Acara	1	1	100
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	B Acara	1	1	100
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1420	1420	100
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	2	100
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	3	3	100
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100



	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	100	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	40	40	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	6	6	100
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	3	3	100
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	100



Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persen	100	100	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	20	20	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	Laporan	5	5	100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	44	44	100
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Laporan	22	22	100
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	Persen	100	100	100
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	Persen	100	100	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	1	1	100
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	1	1	100
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	Laporan	1	1	100
<i>Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan</i>	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan	5	5	100
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	Persen	100	100	100
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasa di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasa di bidang teknologi dan inovasi	Laporan	1	1	100



Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan inovasi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Laporan	1	1	100
Total			100	99.70	99.70

Realisasi berdasarkan serapan anggaran tahun 2025

Alokasi anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025 Rp. 7.545.812.000 terealisasi Rp. 7.221.419.333 dengan Persentase 95,70 % dan realisasi fisik 99,70 %

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Jumlah Anggaran	Realisasi	Selisih	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan	5,938,750,200	5,764,508,112	174,242,088	97.07
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	19,516,000	17,144,540	2,371,460	87.85
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,608,000	11,671,540	936,460	92.57
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	3,590,500	2,850,000	740,500	79.38
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3,317,500	2,623,000	694,500	79.07
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	4,693,842,400	4,619,224,381	74,618,019	98.41
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	4,642,609,400	4,575,219,803	67,389,597	98.55
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	40,597,000	35,057,078	5,539,922	86.35
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	10,636,000	8,947,500	1,688,500	84.12
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah	3,336,000	2,832,700	503,300	84.91
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3,336,000	2,832,700	503,300	84.91
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah	351,321,300	348,166,663	3,154,637	99.10
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4,036,800	3,103,055	933,745	76.87



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347,284,500	345,063,608	2,220,892	99.36
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	355,365,000	340,035,010	15,329,990	95.69
	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit mebel yang Disediakan	10,000,000	8,800,000	1,200,000	88.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	345,365,000	331,235,010	14,129,990	95.91
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan	378,341,500	337,595,039	40,746,461	89.23
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,040,000	3,220,000	1,820,000	63.89
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	66,780,000	58,521,212	8,258,788	87.63
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	306,521,500	275,853,827	30,667,673	89.99
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	137,028,000	99,509,779	37,518,221	72.62
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	65,538,000	37,638,044	27,899,956	57.43
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	60,080,000	60,000,000	80,000	99.87
	Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11,410,000	1,871,735	9,538,265	16.40
II	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase pelaksanaan tahapan perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	687,735,400	636,556,157	51,179,243	92.56
		Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program RPJMD	12,384,000	10,548,880	1,835,120	100.00
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada	631,062,300	588,468,978	42,593,322	93.25
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	50,818,300	49,702,832	1,115,468	97.80
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	13,554,000	13,076,770	477,230	96.48
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	43,587,500	41,732,641	1,854,859	95.74
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah	22,448,500	21,902,044	546,456	97.57
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	108,315,500	104,220,335	4,095,165	96.22
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	27,476,000	25,385,163	2,090,837	92.39



	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	364,862,500	332,449,193	32,413,307	91.12
2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	56,673,100	48,087,179	8,585,921	84.85
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	56,673,100	48,087,179	8,585,921	84.85
3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah	12,384,000	10,548,880	1,835,120	85.18
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12,384,000	10,548,880	1,835,120	85.18
III	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	248,485,500	210,435,628	38,049,872	84.69
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	93,383,000	85,482,055	7,900,945	91.54
		Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	219,098,300	208,374,847	10,723,453	95.11
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	248,485,500	210,435,628	38,049,872	84.69
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	23,828,000	21,178,360	2,649,640	88.88
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	107,659,500	89,319,952	18,339,548	82.97
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	500,000	437,180	62,820	87.44
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	116,498,000	99,500,136	16,997,864	85.41



2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	93,383,000	85,482,055	7,900,945	91.54
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	62,528,000	57,769,403	4,758,597	92.39
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	400,000	349,180	50,820	87.30
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30,055,000	27,017,592	3,037,408	89.89
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	400,000	345,880	54,120	86.47
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	219,098,300	208,374,847	10,723,453	95.11
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	110,077,000	106,608,837	3,468,163	96.85
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	66,287,800	64,790,860	1,496,940	97.74
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11,452,000	7,768,350	3,683,650	67.83
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	31,281,500	29,206,800	2,074,700	93.37
IV	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan	345,975,600	305,513,654	40,461,946	88.30
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah	241,940,000	223,170,751	18,769,249	92.24
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	108,409,500	107,739,720	669,780	99.38



	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	77,553,500	72,176,261	5,377,239	93.07
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	18,220,500	15,754,670	2,465,830	86.47
	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data Dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	37,756,500	27,500,100	10,256,400	72.84
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah	104,035,600	82,342,903	21,692,697	79.15
	Penelitian, Pengembangan dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekrayasaan di bidang teknologi dan inovasi	19,842,600	15,041,940	4,800,660	75.81
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	84,193,000	67,300,963	16,892,037	79.94
Total			7,545,812,000	7,221,419,333	324,392,667	95.70



BAB IV

P E N U T U P

A. TINJAUAN UMUM

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025 secara umum dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan pada Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang. Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajiban di bidang perencanaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan analisis kinerja, capaian target diukur dari indikator utama dan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai, hambatan yang dihadapi, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

B. TINJAUAN KHUSUS

Kendala yang dialami pada Tahun Anggaran 2025 adalah terhadap dokumen/laporan yang disusun adalah data yang menjadi pendukung dalam penyusunan terlambat disampaikan sehingga proses penyelesaian menjadi lebih lama, walau demikian pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan lainnya secara umum dapat dilaksanakan dengan baik, namun ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Penyusunan LKJIP mencerminkan komitmen instansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. LKJIP menjadi sarana untuk menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab atas hasil kinerja yang telah dicapai.

C. KESIMPULAN

Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2025 dapat melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi



dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam pencapaian sasaran dari beberapa sasaran strategis yang dihadapi, secara umum dapat diwujudkan, meskipun demikian masih ada kekurangan-kekurangan dalam tingkat pemanfaatan (benefit) dari hasil perencanaan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Pimpinan sangat mengapresiasi bagian ini karena menunjukkan aspek *continuous improvement*. Langkah tindak lanjut bagi Bapperida dapat berupa:

- Digitalisasi Data: Memperkuat sistem informasi perencanaan untuk integrasi data yang lebih akurat.
- Penguatan Riset: Meningkatkan kolaborasi dengan akademisi dan pihak swasta untuk hilirisasi riset daerah.
- Peningkatan Kapasitas: Melakukan diklat teknis bagi perencana dan analis kebijakan.
- Sinkronisasi Pusat, Provinsi dan Daerah: Memperketat asistensi penyusunan dokumen perencanaan agar selaras dengan target nasional, provinsi dan kabupaten.

Untuk selanjutnya Bapperida Kabupaten Sidenreng Rappang akan menganggarkan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan akan memperhatikan tingkat pemanfaatan (benefit) dan hal utama yang dilakukan adalah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai prinsip Good Governance, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan dan Tahun 2025. Bapperida sudah memiliki fungsional perencana hasil penyetaraan dari Pejabat Eselon IV dan Fungsional Perencana hasil uji Kopetensi yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan hasil dari pelaksanaan pengadaan CPNS Tahun 2024 terdapat dua orang fungsional peneliti namun masih perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui Diklat, Kursus, Workshop Peningkatan Kapasitas.













1. **Pencapaian Kinerja:**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan. Berdasarkan analisis kinerja, capaian target diukur dari indikator utama dan program yang dilaksanakan. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai, hambatan yang dihadapi, dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan.

2. **Efektivitas dan Efisiensi:**

LKJIP memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan, termasuk pemanfaatan sumber daya yang ada. Hal ini mencakup pemanfaatan anggaran, sumber daya manusia, dan sarana-prasarana dalam mencapai tujuan organisasi.

3. **Transparansi dan Akuntabilitas:**

Penyusunan LKJIP mencerminkan komitmen instansi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.



LKJIP menjadi sarana untuk menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab atas hasil kinerja yang telah dicapai.

Penutup:

Penyusunan LKJIP menjadi bagian penting dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). LKJIP ini diharapkan menjadi referensi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang melalui:

1. **Rekomendasi Perbaikan:** Implementasi langkah-langkah strategis untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam evaluasi.
2. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi:** Meningkatkan